



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN
2023

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BEKASI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Jln. Sersan Aswan No. 8 D, RT002/RW009, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp. (021) 8808888 – Faks (021) 8803832

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

@kpknl_bekasi

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi KPKNL Bekasi	2
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) Pada KPKNL Bekasi.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	30
C. Inovasi Dan Prestasi Kerja	30
Bab IV Penutup	38

BAB I

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang membidangi urusan keuangan, memegang peranan penting untuk mengatur pola keuangan agar penyelenggaraan negara tetap terus berjalan. Tata kelola negara diuji untuk merubah paradigma atau cara pandang dalam tata Kelola pemerintahan dan budaya kerja aparatur negara sehingga lebih cepat tanggap dan melayani, yang turut memberikan arah positif terhadap pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), sumber daya manusia. Pembaharuan dan perubahan hanya dapat diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah bertahap yang dilandasi tindakan-tindakan konkret dan realistis, serta melakukan revisi atas berbagai regulasi maupun kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, khususnya terhadap pengelolaan aset negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi sebagai salah satu dari instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang berintegritas, profesional, akuntabel, transparan, dan memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perubahan tata kelola pemerintahan yang harus cepat tanggap dalam penyelenggaraan negara yang disesuaikan dengan kondisi turut menuntut untuk melakukan perubahan tata kelola keuangan negara dengan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan

transparan. Perbaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola pemerintahan sehingga menjadi titik temu yang menggerakkan roda-roda perubahan tata kelola pemerintahan. KPKNL Bekasi sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan perubahan tata kelola keuangan negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. KPKNL Bekasi terus menyikapi dengan rasa bakti kepada negara untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas agar roda perekonomian terus berputar.

Sebagai wujud dari keberhasilan KPKNL Bekasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja adalah terpilihnya KPKNL Bekasi sebagai unit yang diikutsertakan dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2018.
2. Meraih penghargaan Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL BEKASI

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Bekasi menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Bekasi sebagai Kantor Berpredikat WBK dan WBBM, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Bekasi berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bekasi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Bekasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bekasi telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan pedoman "**Melayani dengan SMART**" yaitu Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif dan Terukur. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bekasi dalam melaksanakan tugas, selalu:

1. Simpatik

Simpatik dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mumpuni

Organisasi yang tangguh dan teruji dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

3. Akuntabel

Produk pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Responsif

Cepat tanggap dalam melayani pengguna jasa.

5. Terukur

Memberikan pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga pengguna jasa merasakan pelayanan murah, cepat, dan tepat waktu.

Dengan pedoman "Melayani dengan SMART", Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif, dan Terukur, KPKNL Bekasi selalu memegang komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) PADA KPKNL BEKASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Bekasi mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Beberapa kendala/permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, kendala yang dihadapi yakni:
 - 1) Potensi penjualan BMN yang tidak laku (TAP/wanprestasi), bisa disebabkan harga limit yang terlalu tinggi atau kondisi barang yang tidak diminati. .
 - 2) Jumlah satuan kerja di KPKNL Bekasi relatif lebih sedikit (61 satker), sehingga potensi dari pengelolaan BMN juga rendah.
- b. Berkaitan dengan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, kendali pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK berada di Satker, sehingga **dalam hal hasil pengukurannya di bawah target** maka KPKNL hanya sebatas mendorong optimalisasinya. Kendala yang dihadapi, yakni:
 - 1) Satker merasa sudah jelas mendapatkan informasi tentang form pendataan, namun pada prakteknya, terdapat kendala dalam mengisi form pendataan.
 - 2) *Awareness* Satker terhadap pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK masih rendah, mengingat dampaknya tidak dirasakan dalam waktu dekat..
- c. Berkaitan dengan sertifikasi BMN kendala yang dihadapi, yakni:
 - 1) Terdapat beberapa satker yang belum dapat menyerahkan dokumen kepada Kantor pertahanan karena masih terkendala dokumen yang belum lengkap, sebagian tanah dikuasai pihak lain karena telah dijual pemilik sebelumnya yang membuat satker mengajukan permintaan dan tidak menjadi target.

- 2) Adanya keterlambatan penerbitan PBT di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sehingga SHP di Kantor Pertanahan Kota Bekasi terbitnya di akhir bulan Desember 2024.
 - 3) Untuk sertifikat yang sudah terbit belum divalidasi seluruhnya oleh KPKNL dan Kanwil selaku Pembina, sehingga belum dapat diakui sebagai capaian.
- d. Berkaitan dengan kinerja BMN (portofolio aset), kendala yang dihadapi, yakni penyampaian penjelasan lebih lanjut IKU Portofolio Aset tahun 2023 sudah mendekati akhir Maret 2023 tepatnya tanggal 28 Maret 2023, sehingga pada Q1 KPKNL Bekasi belum berkesempatan untuk menindaklanjuti elemen IKU tambahan berupa *action plan* yang disampaikan secara tertulis dari Satker yang telah mendapatkan rekomendasi.
 - e. Berkaitan dengan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, kendala yang dihadapi, yakni terdapat 1 persetujuan tidak tertindaklanjuti akibat kekurangmampuan calon penyewa dalam membayar sewa yang ditetapkan.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Beberapa permasalahan dalam pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengurusan piutang negara, kendala yang dihadapi yakni debitur tidak datang pada saat panggilan dan nilai angsuran yang tidak signifikan.
- b. Berkaitan dengan penurunan outstanding piutang negara, berbagai upaya penagihan telah dilakukan guna mencapai/melebihi addendum target IKU tahunan dan penurunan outstanding iutang negara tahun ini yang didominasi dari angsuran debitur, namun capaian ini belum tentu akan terulang kembali di tahun berikutnya.
- c. Berkaitan dengan penyelesaian berkas kasus piutang negara, kendala yang dihadapi yakni keberadaan debitur tidak diketahui, ketidakmampuan sebagian debitur untuk menyelesaikan hutangnya, barang jaminan (bergerak) sudah tidak memiliki nilai ekonomis, dan debitur tidak mengakui hutang.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Penilaian sebagai berikut:

- a. Adanya jeda waktu yang cukup lama antara penetapan usulan nilai limit oleh satuan kerja dengan tanggal penilaian sehingga berpengaruh terhadap kondisi serta nilai ekonomis dari objek penilaian (khusus objek selain tanah dan/atau bangunan).
- b. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai suatu objek penilaian.
- c. Sesuai Kepdirjen SOP KPKNL Nomor KEP-59/KN/2023, norma waktu penyelesaian pelayanan penilaian dihitung sejak permohonan masuk sampai

penyampaian laporan penilaian (*end to end*). Hal ini sejalan dengan Manual IKU Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sehingga capaian atas IKU ini terpenuhi. Namun demikian, dalam perangkat pemantauan pengendalian utama, perhitungan penyelesaian penilaian dilakukan secara parsial (tahap penyusunan laporan penilaian). Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpatuhan dalam penyelesaian beberapa laporan penilaian.

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang terdapat permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, yakni berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari lelang yaitu minimnya investor besar untuk membeli property dengan nominal besar sehingga menyebabkan perolehan bea lelang belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun obyek yang ditawarkan cukup banyak namun masih banyak lelang yang dinyatakan TAP, sehingga penerimaan negara tidak optimal dan pelaksanaan lelang tidak maksimal.

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Kemungkinan terjadinya deviasi data PNBP lelang dikarenakan pencatatan dalam Dropbox menggunakan metode akrual (saat PNBP disetor), pencatatan dalam aplikasi OM-SPAN menggunakan metode kas (saat pembukuan).
- b. Kemungkinan terjadinya deviasi data PNBP Piutang dikarenakan dikarenakan pencatatan data PNBP masih dilakukan secara manual.
- c. Penataan arsip BKPn yang perlu ditingkatkan;

6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Subbagian Umum pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, untuk lebih memaksimalkan nilai IKPA dan IKKPA pada akhir tahun dibutuhkan komitmen dari masing-masing seksi terutama seksi teknis dalam menyusun rencana kebutuhan penarikan dana bulanan dengan target realisasi.
- b. Berkaitan IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko, IKU ini merupakan IKU yang relatif baru bagi Subbag Umum, Dimana terdapat pembagian tugas antara Subbag Umum dan Seksi KI yang lebih spesifik, sehingga perlu koordinasi yang lebih baik. Perangkat Penilaian/reviu pengelolaan kinerja pegawai disampaikan oleh Kanwil pada minggu ketiga desember 2023 dengan unsur Penilaian yang cukup banyak, sehingga pemenuhan kelengkapan dokumen tidak maksimal.

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko, IKU ini merupakan IKU yang relatif baru bagi Subbag Umum, Dimana terdapat pembagian tugas antara Subbag Umum dan Seksi KI yang lebih spesifik, sehingga perlu koordinasi yang lebih baik. Perangkat Penilaian/reviu pengelolaan kinerja pegawai disampaikan oleh Kanwil pada minggu ketiga Desember 2023 dengan unsur Penilaian yang cukup banyak, sehingga pemenuhan kelengkapan dokumen tidak maksimal.
- b. Berkaitan dengan Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, kendala yang dihadapi yakni penilaian/reviu dilakukan oleh UKI II sehingga bisa saja terdapat perbedaan pemahaman.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bekasi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2023 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga ikhtisar Kontrak Kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	RAW Target 2023	Target 2023
	Stakeholder Perspective(30%)		
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan		
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp28.213.000.000	100%
	a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp5.750.000.000	
	b. PNBPN Piutang Negara	Rp40.000.000	
	c. PNBPN Lelang	Rp22.423.000.000	
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	103,25%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17
	Customer Perspective(20%)		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp724.295.000.000	100%
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	Rp2.960.000.000	100%

Internal Process Perspective (25%)			
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	498	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	75	100%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
4a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction		94%
4b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online		86%
4c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	36	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%
5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	86%
Learning & Growth Perspective (25%)			
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif		
7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%

8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100,00
8b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%
9	Organisasi yang fit for purpose		
9a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	97%
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	80,00
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif		
10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	60,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bekasi tercatat sebesar 107,07%.

1. Gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	80,18%	80,18%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	80%	103,25%	129,06%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	73,06%	73,06%
		2b-CP Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%	127,31%	127,31%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	69,56%	102,29%
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	121,89%	121,89%
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	117,33%	117,33%

4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	4a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	100%	106,38%
		4b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	100%	116,28%
		4c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	155,57%	155,57%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	7,70%	169,20%
		5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	76,09	108,71%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	97,62%	113,51%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	109,68	109,68%
		8b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,00%	200,00%
9	Organisasi yang fit for purpose	9a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%
		9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	94,60	118,26%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 : Rp2.723.887.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp2.218.637.024,00

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2023 dengan

- a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dalam persentase adalah sebagai berikut:

No	IKU	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	55,79%	83,79%	144,54%	80,18%
2	Persentase Produktivitas Lelang	28,56%	24,76%	29,12%	39,66%	103,25%
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	89,17%
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	141,95%	73,06%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	130,37%	122%	223,75%	127,31%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45	4,66	4,65	4,57	
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	100%	82,90%	69,56%
7	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	100%	102,96%	101,14%	121,89%
8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	179,11%	100,57%	143,08%	117,33%
9	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	-	-	-	100,00%
11	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	310%	118,52%	102,88%	155,57%
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	0,80%	7,70%
13	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	-	76,09
14	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	91,61%	95,83%	93,75%	97,14%	97,62%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	99%	120%	120%	120%	120%

16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,94%	101,71%	96,82%	93,01%	109,68
17	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	0,00%	0,00%
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	100,00%
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	94,60
20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	91,28

b. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah sebagai berikut:

No	IKU	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	80,18%
2	Persentase Produktivitas Lelang	34%	103,25%
3	Indeks Integritas	91,5	89,17%
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	73,06%
5	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	69,56%
6	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	121,89%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	117,33%
8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	155,57%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	27%	7,70%
10	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	80%	97,62%
11	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95%	109,68

c. Target Renja Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	69,56%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	80,18%
3	Indeks Integritas	91,5	89,17%
No	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023
4	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	121,89%
5	Persentase Produktivitas Lelang	34%	103,25%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	127,31%

3. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Berkoordinasi dengan BLU yang ada di KPKNL Bekasi.
- 2) Berkoordinasi dengan satker lainnya di lingkungan KPKNL Bekasi untuk mengoptimalkan PNBPN.
- 3) Melakukan sosialisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada bulan Februari 2023 dengan mengundang seluruh satker yang menjadi target SBSK serta melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
- 4) Sebanyak 90 NUP telah dilakukan Optimalisasi, 79 NUP SBSK 2023 sudah disampaikan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat.
- 5) Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bekasi, Kantah Kabupaten Bekasi, dan Kanwil DJKN Jabar terkait usulan penlok, progres, dan capaian sertifikasi.
- 6) Berkoordinasi dengan satuan kerja target pensertipikatan BMN 2023.
- 7) Berkoordinasi dengan KPKNL Pembina dan satker yang SHP-nya sudah terbit agar segera dilakukan update data di SIMAN, sehingga capaian bisa diakui
- 8) Tim Evaluasi Kinerja KPKNL Bekasi telah melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja terkait. Total capaian di tahun 2023 sebanyak 45 NUP dan *action plan* sebanyak 11 paket.
- 9) Berkoordinasi dengan satker untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan yang dikeluarkan.
- 10) Berkoordinasi dengan satker untuk melakukan updating data di SIMAN terkait persetujuan pengelolaan BMN.
- 11) Melakukan tugas sesuai dengan rekomendasi Itjen
- 12) Menghimbau satuan kerja untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang sudah diterima.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, baik kepada debitur yang tidak memiliki barang jaminan maupun debitur yang memiliki barang jaminan (*shock therapy* akan eksekusi barang jaminan).
- 2) Melakukan upaya pencegahan terhadap debitur dengan nilai *outstanding* utang di atas 1M.
- 3) Melakukan *debt* dan *asset tracing* serta berkoordinasi dengan aparat desa maupun warga sekitar barang jaminan
- 4) Melakukan Penilaian terhadap barang jaminan untuk dilakukan lelang.

- 5) Melakukan penagihan langsung dan menghimbau secara persuasif kepada debitur untuk menyelesaikan hutangnya melalui program keringanan hutang.
 - 6) Meningkatkan pengurusan dengan mengusahakan penyelesaian melalui lelang barang jaminan tidak bergerak.
 - 7) Penyampaian surat paksa dan melakukan penelitian lapangan sebagai syarat penyelesaian secara administrasi (PSBDT).
 - 8) Melakukan tugas sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal diantaranya melakukan pengamanan barang jaminan, pelacakan debitur, penyampaian surat paksa, dan telah dinyatakan tuntas.
- c. Seksi Lelang
- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang khususnya lelang HT, Pailit, PN dan Kejaksaan
 - 2) Memprioritaskan permohonan lelang yang berpotensi laku.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang khususnya lelang HT, Pailit khususnya terhadap obyek lelang yang sudah pada angka likuidasi
 - 4) Mempertahankan pelaksanaan lelang di KPKNL Bekasi secara online *e-auction* dan *e-conventional auction*.
 - 5) Mempertahankan pelaksanaan permohonan lelang di KPKNL Bekasi secara online.
- d. Seksi Penilaian
- 1) Melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang
 - 2) Memberikan edukasi kepada pengguna barang KPKNL Bekasi secara langsung pada saat Tim Penilai melakukan survei lapangan.
 - 3) Koordinasi dengan Seksi Kepatuhan Internal terkait penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien.
 - 4) Membuat alat bantu berupa *database* permohonan penilaian yang dapat memantau norma waktu untuk masing-masing tahapan penilaian
 - 5) Memperhatikan tahapan SOP penyelesaian laporan penilaian untuk setiap tahapannya (tidak terbatas norma waktu *end to end*-nya).
- e. Subbagian Umum
- 1) Membuat Nota Dinas tentang Pelaksanaan Diklat
 - 2) Membuat Program IDP- bagi pegawai
 - 3) Menyampaikan imbauan kepada pegawai untuk mengikuti diklat baik melalui e-learning, PJJ dan tatap muka serta mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat melalui aplikasi Diklat
 - 4) Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
 - 5) Melakukan *multi layer checking* pembuatan SPM dengan melibatkan Operator, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK.

- 6) Melakukan revisi administrasi dalam rangka penyesuaian halaman III DIPA.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait rencana penarikan dana dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.
 - 8) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam Dropbox dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%
 - 9) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam FocusPN dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%
 - 10) Berkoordinasi dengan Seksi Kepatuhan Internal dalam:
 - a) Menyusun PK & PR Kemenkeu Three
 - b) SKP Eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2023.
 - c) Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat/pegawai.
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan terkait pengelolaan kinerja dan laporan pelaksanaan DKO sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
 - e) Melakukan internalisasi terkait kinerja dan risiko
- f. Seksi Hukum dan Informasi
- 1) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam Dropbox dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%
 - 2) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam FocusPN dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%
 - 3) Melakukan rekonsiliasi data FocusPN, Dropbox, Simponi dan Span secara internal antara Seksi Pelayanan lelang, Seksi Hukum dan Informasi (Bendahara Penerimaan) dan Subbagian Umum.
- g. Seksi Kepatuhan Internal
- 1) Telah dibuat unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat
 - 2) Membuat rencana kerja dan pelaporan terkait gratifikasi
 - 3) Telah mengikuti sosialisasi terkait SPI (Survei Penilaian Integritas)
 - 4) Telah dilakukan internalisasi antigratifikasi oleh Kepala Kantor
 - 5) Telah dilakukan pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK
 - 6) Berkoordinasi dengan Seksi Kepatuhan Internal dalam:
 - a) Menyusun PK & PR Kemenkeu Three
 - b) SKP Eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2023.

- c) Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat/pegawai.
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan terkait pengelolaan kinerja dan laporan pelaksanaan DKO sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan internalisasi terkait kinerja dan risiko
- 7) Telah melakukan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) secara berkala
- 8) Telah melakukan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP) pada semester I dan II
- 9) Telah dilakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mandiri, dengan menyampaikan kertas kerja dan dokumen pendukung kepada sekretariat DJKN
- 10) Melakukan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) karena adanya Pimpinan Unit Baru
- 11) Melakukan Penyusunan Profil Pegawai

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Capaian realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6.827.156.733,00 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp5.750.000.000,00 (118,73%). Target PNBPN dapat tercapai karena pendapatan dari hasil penjualan barang rampasan, diikuti dengan hasil pengelolaan BMN umum (sewa dan penjualan BMN) dan pendapatan BLU.
- 2) Terhadap IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan realisasi tahun 2023 mencapai 69,52% melampaui target tahun 2023 sebesar 68%. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada satker Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, BPMSP, BUTTMKP, BPLKSJB, Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD), dan Balai Teknologi Air Minum sebanyak 79 NUP. Kendali pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK berada di Satker, sehingga dalam hal hasil pengukurannya di bawah target maka KPKNL hanya sebatas mendorong optimalisasinya.
- 3) Capaian realisasi BMN berupa tanah yang disertifikatkan sampai dengan Q4 tahun 2023 adalah 607 capaian dari total target pada KPKNL Bekasi sebanyak 498 capaian (121,89%). Target pensertifikatan ini tercapai dikarenakan koordinasi yang baik dan intensif antara KPKNL Bekasi dengan Kantah Kota Bekasi, Kantah Kabupaten Bekasi, dan Kanwil DJKN Jawa Barat terkait usulan penilaian lokasi, progres, dan capaian

sertifikasi serta koordinasi dengan KPKNL Pembina dan satker yang SHP-nya sudah terbit agar segera dilakukan update data di SIMAN, sehingga capaian bisa diakui.

- 4) Pada KPKNL Bekasi, jumlah target evaluasi kinerja BMN dan penyampaian rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2023 sebanyak 29 NUP ditambah tindak lanjut/respon oleh satker sebanyak 7 NUP. Total capaian di tahun 2023 sebanyak 45 NUP dan *action plan* sebanyak 11 paket (155,57%). Keberhasilan capaian yang melampaui target ini sebagai hasil koordinasi yang intensif dengan satuan kerja.
- 5) Seluruh temuan/rekomendasi hasil audit Itjen atas pemindahtanganan berupa penjualan sebanyak 8 temuan. Sampai dengan TW IV, seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas/selesai oleh Itjen Kemenkeu dan KPKNL Bekasi telah melakukan tugas sesuai dengan rekomendasi Itjen.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Capaian IKU sd. Desember 2023 untuk PNBPN tercapai sebesar Rp322.108.212 atau sebesar 805,27% dari target tahunan (Rp 40.000.000). Target PNBPN dapat tercapai, sebagian besar karena adanya angsuran rutin yang dilakukan oleh debitur.
- 2) Terhadap IKU penurunan *Outstanding* Piutang Negara, dilakukan addendum sebanyak 2 kali terhadap target outstanding penyelesaian BKPN dari target semula sebesar Rp700.000.000 menjadi Rp2.960.000.000. Capaian IKU Outstanding PN telah tercapai sebesar Rp3.768.394.080 atau sebesar 127,31% dari target tahunan addendum (Rp2.960.000.000). Penurunan Outstanding PN tahun ini yang didominasi dari angsuran debitur yang belum tentu akan terulang kembali di tahun berikutnya.
- 3) Capaian IKU Q4 2023 untuk Penyelesaian BKPN tercapai 117% (88 BKPN) dari target Tahunan sebanyak 75 BKPN. Tercapainya target ini dikarenakan keaktifan dalam menagih debitur dan mengingatkan agar melaksanakan kewajibannya antara lain melalui mekanisme program keringanan hutang.
- 4) Seluruh temuan/rekomendasi hasil Pengawasan Itjen (sebanyak 13 (tiga belas), telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Bekasi dan telah dianggap tuntas. KPKNL Bekasi telah melakukan tugas sesuai dengan rekomendasi Itjen (diantaranya melakukan pengamanan barang jaminan, pelacakan debitur, penyampaian surat paksa, dan telah dinyatakan tuntas.

c. Seksi Lelang

- 1) Capaian IKU s.d. Bulan Desember 2023 untuk PNBPN Lelang tercapai sebesar Rp15.969.735.294 (atau sebesar 71,22% dari target tahunan). Target PNBPN Lelang tidak dapat tercapai diantaranya karena secara rata-rata nilai limit dengan nominal kecil yang laku terjual, sedangkan dengan nilai limit besar banyak yang masih tidak ada peminat/tidak laku, sehingga

bea lelang yang dipungut mayoritas berasal dari lelang laku dengan nominal kecil.

- 2) Capaian Produktivitas Lelang telah mencapai target Q4 2023 yaitu sebesar 129,06% dari target tahun 2023. Banyaknya lelang laku pada obyek lelang barang bergerak dapat meningkatkan capaian produktivitas lelang, sedangkan barang tetap yang didominasi lelang eksekusi HT, pailit dan PN hanya tercapai sebesar 16,91 %
- 3) Capaian IKU s.d. Bulan Desember untuk Pokok Lelang tercapai sebesar Rp529.140.308.037 (atau sebesar 73,06% dari target tahunan). Target Pokok Lelang bulan Desember tidak dapat tercapai diantaranya karena secara rata-rata nilai limit dengan nominal kecil yang laku terjual, sedangkan dengan nilai limit besar banyak yang masih tidak ada peminat/tidak laku.
- 4) Semua Pelaksanaan Lelang di KPKNL Bekasi telah dilaksanakan secara online *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*, dikarenakan KPKNL Bekasi mempertahankan pelaksanaan lelang di KPKNL Bekasi secara online *e-auction* dan *e-conventional auction*.
- 5) Semua Pelaksanaan Permohonan Lelang di KPKNL Bekasi telah dilaksanakan secara online dikarenakan KPKNL Bekasi mempertahankan pelaksanaan permohonan lelang di KPKNL Bekasi secara online.

d. Seksi Penilaian

- 1) Pada tahun 2023, untuk IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, KPKNL Bekasi mencatatkan deviasi sebesar 7,70%. Khusus untuk objek penilaian berupa selain tanah dan bangunan, terdapat potensi nilai hasil penilaian lebih rendah dibandingkan usulan nilai limit yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penjualan selain tanah dan bangunan dengan tidak menggunakan nilai hasil penilaian sehingga mengakibatkan adanya deviasi.
- 2) Pada tahun 2023, untuk IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 76,09. Terdapat perbedaan formula perhitungan antara manual IKU 2023 dengan formula dalam perangkat pemantauan kepatuhan. menyebabkan beberapa permohonan yang dipantau tergolong dalam kategori tidak patuh meskipun capaian IKU terpenuhi.

e. Subbagian Umum

- 1) Sudah tercapainya kompetensi seluruh pegawai sebanyak 30 (tigapuluh) jmlat. Tercapainya target ini karena Subbagian Umum membuat Nota Dinas tentang Pelaksanaan Diklat, membuat Program IDP- bagi pegawai dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat melalui aplikasi Diklat
- 2) Nilai IKPA KPKNL Bekasi sudah maksimal. Untuk lebih memaksimalkan nilai IKPA dan IKKPA pada akhir tahun dibutuhkan komitmen dari masing-masing seksi terutama seksi teknis dalam menyusun rencana kebutuhan penarikan dana bulanan dengan target realisasi.

3) Deviasi Data PNBPN Lelang KPKNL Bekasi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,0%. KPKNL Bekasi berhasil menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam Dropbox dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%

f. Seksi Hukum dan Informasi

Deviasi Data PNBPN Piutang Negara KPKNL Bekasi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,0%. KPKNL Bekasi berhasil menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam FocusPN dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 15%

g. Seksi Kepatuhan Internal

1) Capaian IKU Indeks Integritas tahun 2023 sebesar 89,17, melampaui target sebesar 88,67 (atau sebesar 100,56% dari target tahunan). Penilaian dilakukan secara umum (terhadap DJKN) bukan khusus Unit Kantor. Terdapat pengaduan masyarakat secara resmi melalui WISE pada KPKNL Bekasi

2) Capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif tahun 2023 sebesar 91,28, melampaui target sebesar 60 (atau sebesar 152,13% dari target tahunan). Banyaknya unsur Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif sebagai penilaian IKU dimana beberapa unsur tersebut memiliki dateline yang sama dengan dateline IKU, sehingga penyelesaiannya dalam pencapaian IKU menjadi kurang efektif

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Bekasi dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2023, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 5 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 12 orang
- c. Ijin belajar : 0 orang
- d. Pegawai pensiun : 2 orang
- e. Pegawai mengikuti diklat : 39 orang

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PKN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders*;
- 4) Pemberian pemahaman terhadap satuan kerja melalui sosialisasi kebijakan Pengelolaan/Penatausahaan BMN dan bimbingan teknis aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SIMAN, SiMantap.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*;
- 2) Menjadikan sarana media sosial (*Whatsapp Group*) sebagai saluran informasi dan penyampaian kendala bagi dan dari satuan kerja; dan
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan kepada satuan kerja, terutama peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang baru terkait pengelolaan/penatausahaan BMN termasuk dalam hal Revaluasi BMN.

b. Seksi Piutang Negara

Pada Seksi Piutang Negara, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders* penyerah piutang;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga;
- 2) Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang Piutang Negara;
- 3) Penggalian potensi piutang, dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga pemerintah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Pada Seksi Pelayanan Penilaian, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar seksi dalam internal KPKNL terutama dengan seksi PKN sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan Penilaian;

- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Koordinasi yang intensif dengan Kanwil DJKN Jabar dan Direktorat Penilaian
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders*;
- 3) Membuat program kegiatan pembentukan data pembanding.

d. Seksi Pelayanan Lelang

Pada Seksi Pelayanan Lelang, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, pejabat fungsional Pelelang, dan antar Seksi/Subbagian di internal KPKNL) sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan lelang;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif, serta pelayanan prima kepada *stakeholders* pengguna jasa Lelang;
- 4) Kondisi Pasar atau daya beli masyarakat yang rendah, barang yang kurang marketable dan limit yang tinggi merupakan beberapa alasan tidak tercapainya target/rencana seksi lelang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Memberikan sosialisasi dan publikasi terkait lelang kepada pengguna jasa lelang baik kepada pemohon maupun peminat lelang agar mereka mengenal serta memahami sistem penjualan secara lelang melalui aplikasi *e-auction* yang mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem manual/dengan kehadiran;
- 2) Mengadakan *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholder* pemohon lelang terkait penetapan nilai limit yang wajar dan peningkatan pemasaran terhadap objek lelang.
- 3) Melakukan kunjungan/pertemuan resmi dengan para *stakeholder* di wilayah kerja agar terjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelayanan lelang.

e. Seksi Hukum dan Informasi

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;

- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Seksi Hukum dan Informasi berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan Subbagian Umum guna membiayai biaya-biaya atas pengambilan putusan perkara pengadilan; dan
- 3) Berkoordinasi antar Seksi terutama seksi Pelayanan Lelang dan Piutang Negara untuk melakukan kerja sama terkait penanganan perkara pada KPKNL Bekasi dan juga dalam penatausahaan BKPN.

f. Subbagian Umum

Pada Subbagian Umum, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Subbagian Umum;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Subbagian Umum berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan Seksi-sesi lain terkait pembiayaan guna pencapaian kinerja organisasi

g. Seksi Kepatuhan Internal

Pada seksi Kepatuhan Internal, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop;
- 2) Internalisasi atas tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal seperti contoh Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemantauan Gratifikasi, Pengelolaan Kinerja, dll.;

- 3) Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJKN;

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disebabkan Rendahnya tingkat kepatuhan Satker K/L yang telah mendapat persetujuan pemanfaatan BMN. Yang dapat berdampak pada PNPB BMN tidak optimal. Pada tahun 2023 jumlah terdapat persetujuan pemanfaatan yang tidak ditindaklanjuti sebesar 13%. Meski demikian pada tahun 2023, PNPB BMN sudah tercapai.
- 2) Adanya satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN. Berdasarkan data tahun 2023, persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti sebesar 18,75% dan sudah melewati waktu persetujuan.
- 3) Adanya aset yang berpotensi idle pada satker K/L. Berdasarkan data pemeriksaan itjen, diketahui terdapat sekitar 36 Objek BMN yang berpotensi idle dari total 45 BMN yang telah diinventarisasi (80%). Kinerja tingkat kesesuaian BMN terhadap SBSK s.d. 2023 yaitu sebesar 69,29% ,sehingga risiko diperkirakan mempengaruhi kinerja 5-10%
- 4) BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai) yang disebabkan dokumen hilang/rusak dan kesulitan mencari ahli waris untuk surat keterangan. Capaian kinerja untuk pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2023 mencapai 121,89%.
- 5) Penyampaian *feedback/action plan* atas rekomendasi KPKNL terkait evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) yang disebabkan kurangnya edukasi terkait kinerja BMN. Pada tahun 2023 terdapat 11 Paket dari target sebesar 7 Paket yang telah menyampaikan *feedback* kepada KPKNL (setara dengan 157%).

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Piutang negara yang disetor masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena debitur tidak tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai tanggungan hutang; debitur tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar; alamat penagihan yang tidak jelas. Kinerja IKU Outstanding Piutang Negara tercapai karena 10% debitur yang melakukan pembayaran telah dapat memenuhi target Penurunan Outstanding PN.
- 2) Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara yang disebabkan karena debitur tidak tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai tanggungan hutang; debitur tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar; alamat penagihan yang tidak jelas. Pada tahun 2023, terdapat

95% debitur tidak melakukan pelunasan. Pelunasan oleh 5% Debitur tidak dapat memenuhi target penyelesaian BKPN.

- 3) Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih yang disebabkan karena umur Piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, Dokumen pendukung yang tidak lengkap, penolakan pembayaran oleh debitur. Sampai dengan Desember 2023, BKPN yang diselesaikan tercapai 88 dari target tahunan 75.

c. Seksi Lelang

- 1) Adanya lelang laku dengan nominal besar (Lelang *Booming*) yang disebabkan adanya lelang HT dan kurator dengan nominal lebih dari Rp20M. Pada tahun 2023 hanya terdapat 1 lelang dengan nominal diatas Rp20M dari 376 total lelang laku (0,26%).
- 2) Adanya Pembatalan Lelang yang disebabkan berkas lelang tidak memenuhi syarat dan adanya permintaan pembatalan lelang dari penjual. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target kinerja lelang (penurunan kinerja). Pada tahun 2023, kinerja persentase hasil pokok lelang sebesar 73,06%.
- 3) Rendahnya nominal lelang laku terjual yang disebabkan investor besar belum tertarik untuk membeli aset melalui lelang. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target kinerja pokok dan PNBPN lelang (penurunan kinerja). Sampai dengan bulan November 2023, pokok lelang baru mencapai 62,68% dari target dan PNBPN 75,5%.
- 4) Banyaknya jenis lelang HT dan Kepailitan yang Tidak Ada Penawaran (TAP) yang disebabkan kurangnya informasi pelaksanaan lelang kepada masyarakat, image negatif barang lelang, objek lelang kurang marketable, penetapan nilai limit objek lelang yang tinggi. Pada tahun 2023, terdapat 781 lelang HT dan Pailit yang TAP dari 990 keseluruhan lelang HT dan Pailit atau sebesar 78,8%. Dengan adanya perubahan formula perhitungan produktivitas lelang, capaian IKU produktivitas lelang dapat tercapai. Persentase perhitungan produktivitas untuk lelang HT dan Pailit 5%, sehingga tidak signifikan.

d. Seksi Penilaian

- 1) Penyampaian laporan penilaian yang melebihi batas waktu yang disebabkan oleh permohonan yang masuk bersamaan/dalam jumlah banyak yang berdampak adanya keluhan dari pemohon layanan. Sekitar 6% penyampaian laporan penilaian yang melebihi waktu dan kurang dari 2 kali terima keluhan dari pengguna.
- 2) Adanya perbedaan nilai antara permohonan dengan nilai wajar BMN dalam rangka penilaian untuk tujuan pemindahtanganan /pemanfaatan yang disebabkan karena Kurangnya pemahaman dari satuan kerja mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai taksiran suatu objek penilaian sehingga mengajukan nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar. Deviasi yang terjadi sampai dengan Desember 2023

sebesar 7,70%. Deviasi yang terjadi masih jauh dibawah batas maksimal yaitu 25%

e. Subbagian Umum

- 1) Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi yang disebabkan kualitas IKU pegawai rendah dan kompetensi pegawai rendah. Pada tahun 2023, predikat kinerja semua pegawai diatas baik. (0%). Persentase capaian kinerja organisasi (NKO) tahun 2023, tercapai sebesar 107,07% [ISTIMEWA] (risiko tidak mempengaruhi kinerja (0%).
- 2) Rendahnya minat pegawai mengikuti diklat yang disebabkan tingginya load pekerjaan sesuai tusi masing-masing pegawai. Pada tahun 2023, capaian persentase pengembangan kompetensi pegawai sebesar 116,92% (risiko tidak mempengaruhi kinerja (0%).
- 3) Kesalahan pencatatan data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disebabkan tingginya frekuensi transaksi penyetoran bea lelang sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam mencatat PNBPN; kurangnya implementasi pengendalian intern; Belum disetornya PNBPN pada periode berjalan. Sampai dengan tahun 2023, tidak terjadi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN.
- 4) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi yang disebabkan oleh pelanggaran nilai-nilai atau prinsip integritas sehingga memperoleh keuntungan dan/atau merugikan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sepanjang 2022 - 2023 tidak ada kejadian fraud di KPKNL Bekasi (hanya ada dugaan).

f. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Kesalahan pencatatan data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disebabkan tingginya frekuensi transaksi penyetoran PNBPN sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam mencatat PNBPN, kurangnya implementasi pengendalian intern, belum disetornya PNBPN pada periode berjalan. Sampai dengan tahun 2023, tidak terjadi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN.
- 2) Respon atas jawaban PPID Tingkat III DJKN melebihi batas waktu yang ditentukan yang berdampak adanya keberatan dari pemohon informasi publik. Respon jawaban atas permohonan informasi publik dapat disampaikan tepat waktu sehingga sehingga tidak menurunkan reputasi dan capaian kinerja KPKNL.

g. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi yang disebabkan kualitas IKU pegawai rendah dan kompetensi pegawai rendah. Pada tahun 2023, predikat kinerja semua pegawai diatas baik. (0%). Persentase capaian kinerja organisasi (NKO) tahun 2023, tercapai sebesar 107,07% [ISTIMEWA] (risiko tidak mempengaruhi kinerja (0%).

- 2) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi yang disebabkan oleh pelanggaran nilai-nilai atau prinsip integritas sehingga memperoleh keuntungan dan/atau merugikan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sepanjang 2022 - 2023 tidak ada kejadian fraud di KPKNL Bekasi (hanya ada dugaan).

8. Rekomendasi rencana aksi

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Lebih lanjut terus berkoordinasi dengan BLU dan satker di lingkungan KPKNL Bekasi.
- 2) Berkoordinasi dengan satker dalam hal terdapat kendala dalam mengisi form pendataan dalam rangka pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
- 3) Koordinasi yang lebih intensif dengan Kantah dan Satker terkait target yang belum tercapai dalam hal pensertifikatan BMN berupa tanah.
- 4) Koordinasi dengan satker, KPKNL dan Kanwil Pembina untuk mengupdate data SIMAN untuk tanah yang sudah terbit SHP.
- 5) Koordinasi dengan satker terkait pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.
- 6) Koordinasi dengan satker untuk penginputan data dukung ke SIMAN.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Optimalisasi Pengurusan PN melalui Penyampaian SP sekaligus penelitian lapangan khususnya untuk debitur dengan jumlah hutang sd kurang dari Rp500 juta yang tidak memiliki barang jaminan agar dapat ditindaklanjuti dengan PSBDT.
- 2) Tetap aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, melakukan upaya pencegahan dan melakukan upaya lelang barang jaminan, melaksanakan kewajibannya melalui mekanisme program keringanan hutang.
- 3) Melanjutkan penelusuran debitur dan barang jaminan dan berkoordinasi dengan pemda setempat.
- 4) Peningkatan pengurusan piutang negara secara optimal melalui program keringanan hutang.
- 5) Melakukan Upaya tindakan keperdataan.
- 6) Berkoordinasi dengan satker dan Itjen terkait menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil Pengawasan Itjen.

c. Seksi Lelang

- 1) Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang gagal laku pada tahun 2023, sehingga bisa laku pada Triwulan I Tahun 2024.
- 2) Berkoordinasi dengan para pemohon lelang terkait rencana lelang tahun 2024.
- 3) Melakukan sosialisasi lelang dan regulasi lelang yang baru terkait lelang kepada *stakeholder* seksi lelang.

- 4) Mempertahankan pelaksanaan lelang di KPKNL Bekasi secara online *e-auction* dan *e-conventional auction*.
 - 5) Mempertahankan pelaksanaan permohonan lelang di KPKNL Bekasi secara online.
- d. Seksi Penilaian
- 1) Koordinasi dengan Pengelola Barang terkait ketergunaan hasil penilaian.
 - 2) Melanjutkan pemberian edukasi kepada pengguna barang melalui kegiatan sosialisasi maupun pada saat survei lapangan.
 - 3) Menyempurnakan alat bantu berupa *database* permohonan penilaian yang selaras dengan SOP Nomor KEP-59/KN/2023.
 - 4) Melakukan kegiatan penyelesaian permohonan penilaian sesuai SOP Nomor KEP-59/KN/2023.
 - 5) Memberikan bahan masukan mengenai materi pemantauan pengendalian utama terkait pelayanan penilaian.
- e. Subbagian Umum
- 1) Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mengingatkan kembali untuk mengikuti diklat.
 - 2) Menyarankan pegawai untuk mengikuti diklat mandiri melalui E-Learning.
 - 3) Terus melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait kebutuhan penarikan anggaran bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.
 - 5) Melakukan penginputan dropbox/focusPN secara berkala dengan akurat dan melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.
 - 6) Melakukan reviu atas SKP pejabat/ pegawai.
 - 7) Mengikuti e-learning terkait kinerja/risiko.
- f. Seksi Hukum dan Informasi
- 1) Melakukan penginputan data FocusPN dengan mengacu pada data Simponi/SPAN.
 - 2) Melakukan penginputan data FocusPN secara berkala dan akurat.
 - 3) Melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.
- g. Seksi Kepatuhan Internal
- 1) Melakukan dan mengikuti kegiatan sosialisasi melalui berbagai media terkait integritas
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja Organisasi secara berkala
 - 3) Mengikuti *e-learning* terkait kinerja/risiko

- 4) Melakukan Penyusunan *Fraud Risk Scenario* (FRS) semester II 2023
- 5) Melakukan Pemantauan secara berkala

B. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2023 KPKNL Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.723.887.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Bekasi berdasar Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Riil, dan Capaian Efisiensi sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran : Rp2.218.637.024,00
2. Capaian Keluaran Riil : 81%

C. Inovasi dan Prestasi Kerja

1. Inovasi

a. Inovasi dan Teknologi Informasi

KPKNL Bekasi mengikutsertakan dua inovasinya yaitu Sistem Informasi Manajemen Kinerja Utama (SIM-KU) dan Aplikasi Layanan Pasca Lelang (ALASCA) sebagai nominasi dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2020, Pada tahun 2022, inovasi ini sedang dikembangkan agar dapat memenangkan kompetisi di tahun berikutnya. KPKNL Bekasi juga berhasil menjadi mentor bagi KPKNL Metro dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Inovasi lain di mana KPKNL Bekasi memfasilitasi pembuatan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melalui Pojok SKPT.

a. Program Perubahan

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibentuk Program Perubahan pada KPKNL Bekasi sebagai berikut:

1) Program Revitalisasi dan Penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Revitalisasi dan Penyempurnaan APT sebagai public face KPKNL Bekasi, yaitu image/wajah keseluruhan KPKNL Bekasi yang tercermin di depan *stakeholder*. APT merupakan salah satu titik awal dan akhir interaksi

KPKNL Bekasi dengan *stakeholder* sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Program ini dinamakan REPEAT karena aktivitas dan kegiatan di APT merupakan proses yang berulang. Proses ini seharusnya memberikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi lebih baik di setiap repetisinya.

Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.
- c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2) Program *Monday Evaluation* (MODEL)

Evaluasi merupakan implementasi dari Nilai Kementerian Keuangan yaitu Kesempurnaan. Dalam rangka menuju kesempurnaan, KPKNL Bekasi senantiasa melakukan *continues improvement* melalui evaluasi pada setiap aktivitas yang dilakukan. *Monday Evaluation* dilakukan setiap senin pagi sebagai evaluasi atas kegiatan dan aktivitas yang dilakukan seluruh elemen KPKNL Bekasi dalam periode seminggu sebelumnya.

3) Program Cengkrama Edukasi dan Idea (Rabu CENDEKIA)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPKNL Bekasi, diperlukan sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan, edukasi dan ide-ide pegawai. RABU CENDEKIA dijadwalkan rutin setiap Rabu untuk menambah kompetensi pegawai KPKNL Bekasi. Materi yang dibawakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga *soft-skill* dan pengetahuan umum. Pegawai yang selesai melaksanakan diklat dijadwalkan untuk menjadi narasumber dalam RABU CENDEKIA. Sesekali waktu KPKNL Bekasi juga mendatangkan narasumber dari pihak yang berkompeten untuk menambah kualitas konten kegiatan ini.

4) Program Galang Semangat Pagi (GSP)

Kegiatan ini merupakan perwujudan budaya Kementerian Keuangan dalam waktu 15-20 menit. Dalam GSP tertuang komitmen dan disiplin pegawai KPKNL Bekasi dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan organisasi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan bersemasama, *sharing* informasi singkat (implementasi *one day one information*) dan ditutup dengan *yel-yel* bersama. GSP dijadwalkan

sebelum mulai jam layanan yaitu pada pukul 07.45 s.d 08.00 WIB bergantian setiap harinya sehingga seluruh pegawai KPKNL Bekasi mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik (internal).

5) Program Sosialisasi, Interaksi dan *Corporate Social Responsibility* (LITERASI)

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, KPKNL Bekasi juga melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari masyarakat. KPKNL Bekasi senantiasa berusaha memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan fungsinya. Selama ini KPKNL Bekasi telah melaksanakan sosialisasi dan interaksi baik kepada *stakeholder* maupun kepada masyarakat secara umum. LITERASI merupakan wadah untuk mendokumentasikan dan *public campaign* kegiatan tersebut.

6) Program Informasi Kinerja (INFRA)

INFRA merupakan bentuk digitalisasi dalam penyampaian informasi kinerja KPKNL Bekasi. Sebagai satu organisasi, seluruh pegawai seharusnya mengetahui tidak hanya kinerja masing-masing pegawai/seksinya, tetapi juga kinerja KPKNL Bekasi secara keseluruhan.

Penyampaian dilakukan dalam bentuk infografis atau video yang menarik untuk dilihat dan dibaca. INFRA juga dibagikan kepada *stakeholder* dan masyarakat dalam bentuk digital melalui media sosial dan media lainnya.

7) Program *Collaborated Auction* (COLLABORAUCTION)

Lelang merupakan salah satu layanan unggulan pada KPKNL Bekasi, dengan target yang selalu meningkat dan challenging dari tahun ke tahun membuat KPKNL Bekasi membuat terobosan dan ide-ide baru untuk mencapainya. COLLABORAUCTION merupakan salah satu upaya untuk mencapai target dan sasaran kinerja dengan melakukan sinergi bersama *stakeholder* untuk menyelenggarakan lelang skala besar. COLLABORAUCTION diharapkan dapat mendongkrak capaian lelang terutama pada capaian pokok lelang, bea lelang, dan frekuensi lelang laku.

c. Inovasi Prosedur dan Layanan

1) Pendekatan Kepada Pengguna Layanan Melalui *Whatsapp Care*

KPKNL Bekasi senantiasa berupaya untuk dekat dengan pengguna layanan melalui dibukanya kanal informasi berbasis aplikasi Whatsapp. Melalui aplikasi ini Pengguna layanan dilayani, melalui 2 (dua) metode, yaitu diskusi chat interaktif senin sampai dengan jumat pkl. 8.00 sampai

dengan pkl 16.30, dan layanan jawab otomatis diluar jam layanan chat interaktif sehingga *Whatsapp Care* melayani penuh selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.

2) *One Day One Service* Penetapan Lelang

Khusus permohonan penjualan BMN, permohonan penetapan lelang akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak surat penetapan lelang sejak dokumen lengkap diterima. Hal tersebut merupakan percepatan dari SOP Layanan Unggulan DJKN dengan norma waktu 2 (dua) hari.

3) *One Day One Service* Penetapan Status Pengguna BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Khusus permohonan status penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan,

Surat Keputusan akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak dokumen lengkap.

4) Sinergi Pelayanan Persetujuan Penjualan BMN Dengan Pelayanan Lelang

Sinergi pelayanan dimaksud dalam hal kelengkapan dokumen permohonan lelang BMN yang harus dilampirkan oleh satuan kerja pemohon lelang. Dalam hal ini, satuan kerja tidak perlu melampirkan kembali surat persetujuan Penjualan BMN ketika mengajukan permohonan lelang. Layanan ini berlaku untuk surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan KPKNL Bekasi.

5) Penetapan Prosedur di Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Area Pelayanan Terpadu sebagai *public face* KPKNL Bekasi, adalah cerminan wajah keseluruhan KPKNL Bekasi di depan *stakeholder*. APT disebut sebagai salah satu titik awal dan akhir interaksi KPKNL Bekasi dengan *stakeholder* sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Oleh sebab itu, perlu untuk selalu dibenahi sebagai tindak lanjut survey dan peningkatan kepuasan pengguna layanan dengan Program "Revitalisasi dan Penyempurnaan APT atau disingkat REPEAT". Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.
- c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang pernah diraih oleh KPKNL Bekasi:

- a. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018);
- b. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021);
- c. Pejabat Lelang Kelas I Terbaik Ketiga Tahun 2017 dan 2019. (DJKN, 2018 & 2020);
- d. Juara 3 Kompetisi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020);
- e. Partisipasi dalam Kegiatan Lelang UMKM Tahun 2021 (Direktorat Lelang DJKN, 2021);
- f. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- g. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- h. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Penilaian 2022;
- i. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Oeang ke 76 Tahun 2022;
- j. Juara II dalam Grand Final KOIN MAS 2022/2023 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 untuk kategori Optimalisasi Aset Pada Pengelola Barang KOIN MAS 2022/2003.
- k. Untuk tahun 2023, Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 107,07%
- l. Penghargaan Atas Service Excellent Pelayanan Lelang Semester I tahun 2023 (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk)

Prestasi Unit Kerja Nasional

1. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018)
2. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021)



1

Prestasi Unit Kerja Nasional

3. Partisipasi dalam Kegiatan Lelang UMKM Tahun 2021 (Direktorat Lelang DJKN, 2021)
4. Juara 3 Kompetisi Pengelolaan BMM di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020)
6. Pejabat Lelang Kelas I Terbaik Ketiga Tahun 2017 dan 2019 (DJKN, 2018 & 2020)



2

Prestasi Unit Kerja Nasional

6. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Pendidikan 2022
7. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Olahraga ke 76 Tahun 2022
8. Juara II dalam Grand Final KOIN MAS 2022/2023 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 untuk kategori Optimalisasi Aset Pada Pengelola Barang KOIN MAS 2022/200



3

Prestasi Unit Kerja Regional

9. Saiker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi 2022)
10. Saiker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022)
11. Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) Peringkat Ketiga Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2021 (Kanwil DJKN Jawa Barat, 2021)



4

Prestasi Unit Kerja Regional

12. Program Penghargaan Alas Service Excellent Pelayanan Lelang Semester I tahun 2023 (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk)



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Bekasi secara umum pada Tahun Anggaran 2023 adalah istimewa. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang serta IKU Persentase realisasi pokok lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2023 tercapai sebesar 107,07%.

Di samping itu, KPKNL Bekasi sebagai Kantor Pelayanan Percontohan peringkat II tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2018, serta peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020, tetap mempertahankan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada *stakeholder*. KPKNL Bekasi terus berusaha melaksanakan upaya perbaikan diri dari sisi pelayanan melalui pengembangan inovasi teknologi yang memudahkan tugas tugas sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa KPKNL Bekasi belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada.

Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Bekasi akan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bukti keseriusan KPKNL Bekasi untuk terus bertransformasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan.